

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Heni Handayani

NIM : 161.121.030

Tempat, Tgl Lahir : Sragen, 02 Maret 1998

Alamat : Pondok, RT 20, Tombol, Mondokan, Sragen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **STUDI KRITIS ATAS PEMIKIRAN HAMKA TENTANG KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila didalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Selain itu, apabila didalamnya terdapat plagiasi yang dapat berakibat gelar kesarjanaan saya dibatalkan, maka saya siap menanggung resikonya.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surakarta, 10 Februari 2021

Yang bersangkutan

Heni Handayani

Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Heni Handayani

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

IAIN Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama surat ini kami beritahukan bahwa setelah membaca, menelaah, membimbing dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami mengambil keputusan skripsi saudara **Heni Handayani** dengan Nomor Induk Mahasiswa 161121030 yang berjudul:

STUDI KRITIS ATAS PEMIKIRAN HAMKA TENTANG

KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM.

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dalam bidang Aqidah dan Filsafat Islam . Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar skripsi diatas dapat dimunaqosahkan dalam waktu dekat. Demikian atas perhatian dan diperkenankannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 Februari 2021

Dosen Pembimbing



Dr. Yusup Rohmadi, M. Hum

NIP. 19630202 199403 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **STUDI KRITIS ATAS PEMIKIRAN HAMKA TENTANG KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM** atas nama **Heni Handayani** dengan Nomor Induk Mahasiswa 161121030 telah dimonqosahkan oleh Dewan penguji skripsi Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, pada tanggal 23 Februari 2021 sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dalam bidang Aqidah dan Filsafat Islam.

Surakarta, 23 Februari 2021

PANITIA UJIAN MUNAQSAH

Ketua Sidang

Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum

NIP. 19630202 199403 1 003

Penguji I

Penguji Utama

Dr. H.Syamsul Bakri, S.Ag, M.Ag

Dr. R. Lukman Fauroni, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710105 199803 1 001

NIP. 19720902 200901 1 008

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ushuluddin dah Dakwah

Dr. Islah, M.Ag.

NIP. 19730522 200312 1 001

ABSTRAK

HENI HANDAYANI, Studi Kritis atas Pemikiran Hamka tentang Keadilan Sosial dalam Islam. Menganalisis Konsep Keadilan Sosial dalam Islam dalam pandangan Hamka ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi oleh peminat filsafat Islam, karena belum banyak yang meneliti tentang pemikiran ini. Konsep keadilan sosial dalam Islam khususnya dalam pandangan Hamka perlu diteliti. Rumusan penelitian dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsep keadilan sosial dalam Islam menurut Hamka?. (2) Bagaimana relevansi pemikiran Hamka dengan problem sosial di Indonesia?.

Penelitian ini bersifat kepustakaan. Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya-karya Hamka yang berkaitan tentang keadilan sosial dalam Islam. Untuk sumber sekundernya diambil dari buku, jurnal, makalah ilmiah yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskripsi, kesinambungan historis dan interpretasi.

Hasil penelitian ini menyatakan (1) Dalam konsep keadilan sosial dalam Islam Hamka membagi tiga bagian, yaitu: *pertama* keadilan sosial dalam bidang ekonomi, *kedua* dalam bidang hukum dan *ketiga* dalam bidang politik pemerintahan. (2) Dalam rangka menyelesaikan problem sosial di Indonesia teori Hamka sangat relevan dan tidak bertentangan dengan dasar ideologi Negara karena teori keadilan sosial Hamka relevan dengan Pancasila sila ke-2 dan ke-5.

Kata kunci: Hamka, keadilan sosial, Islam

MOTTO

“Berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak keberanian”

(Buya Hamka)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

Ayah dn ibuku tercinta yang telah mendidikan dan membesarkanku

Civitas akademik

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

dengan nama-nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha penyayang. Segala puji bagi Allah yang menguasai alam shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad saw. Beserta sahabat dan keluarganya.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta atas izin-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan dalam penulisan skripsi ini. Namun demikian, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa ada bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh sebab itu, dengan selesainya skripsi ini rasa terimakasih yang tulus dan rasa hormat yang dalam kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Bapak Dr. Islah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Nurlaili Muhadiyatiningsih, M.Hum selaku Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
4. Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum selaku dosen pembimbing yang sangat membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Dewan Penguji Munaqosah yang telah berkenan memberi koreksi, evaluasi, dan arahan kepada penulis agar penelitian ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Ibu Dosen yang dengan penuh semangat dan ikhlas dalam mengajarkan ilmunya selama masa studi ini.
7. Petugas Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan peminjaman buku, sehingga dapat referensi yang dibutuhkan dapat menulis skripsi dengan baik.
8. Bapak ibu tercinta yang memberikan dukungan moril dan materiil, spirit dari waktu ke waktu, dan memberikan pelajaran berharga dari dulu hingga sekarang.
9. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menulis skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun yang penulis harapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Surakarta, 10 Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II BIOGRAFI HAMKA19

A. Riwayat Hidup	19
B. Pendidikan Hamka dan perjalanan karirnya	21

C. Karya-karya hamka.....	28
BAB III TEORI-TEORI KEADILAN	31
A. Pengertian Keadilan.....	31
B. Pandangan tokoh tentang keadilan sosial.....	34
1. Keadilan sosial dalam tradisi barat	
2. Keadilansosial dalam tradisi Islam	42
C. Teori keadilan sosial dalam Islam	45
BAB IV ANALISIS KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM	
 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PROBLEM SOSIAL	
 DI INDONESIA.....	53
A. Konsep keadilan sosial dalam Islam menurut Hamka.....	53
1. Keadilan dalam bidang Ekonomi	53
2. Keadilan dalam bidang hukum	62
3. Keadilan dalam bidang politik pemerintahan	67
B. Relevansi pemikiran hamka tentang keadilan sosial terhadap problemsosial di Indonesia.....	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran filosofis Soekarno bahwa, keadilan sosial adalah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Pemikiran tersebut mengandung pemahaman bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai-nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara.¹ Lahirnya gagasan tentang konsep keadilan tersebut merupakan hasil refleksi Soekarno tentang masa gelap sejarah bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan, penindasan, penghinaan dan penghisapan oleh penjajah belanda dan jepang.²

Pada kenyataannya keadilan masih sangat jauh dari harapan, walaupun cita-cita keadilan sudah dicanangkan sejak awal kemerdekaan. Dalam bidang hukum, sering kali kita dipertontonkan kasus pejabat publik yang merugikan negara sampai milyaran bahkan triliunan dijerat

¹ Yunie Herawati, "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, no. 1(2014), h. 20

²*Ibid.*,

hukum yang seringkali tidak sebanding dengan perbuatannya bahkan belum dijamah hukum.³

Di bidang pendidikan, dapat kita lihat betapa sistem pendidikan belum memberi ruang yang luas pada murid untuk mengatakan kata-kata dari pikirannya sendiri dan hanya sekedar kegiatan teknis yang mengajarkan pengertian-pengertian pikiran murid seolah-olah sekedar menjadikannya data informasi saja. Sistem pendidikan harus fungsional. Disisi lain pendidikan hanya digunakan untuk melegitimasi ataupun melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada. Namun demikian sejak era reformasi pendidikan sudah mengarah pada peran perubahan menuju tatanan sosial yang adil dan demokratis. Dalam praktiknya, dunia pendidikan di tanah air masih sangat jauh dari prakteknya. Modal UAN yang hanya mengandalkan beberapa bidang studi ini hanya memberikan stimulus pada otak anak bahwa mata pelajaran yang lain tidaklah penting. Pendidikan seharusnya ditujukan untuk memanusiakan manusia dengan menyumbang gagasan yang demokratis dan berkeadilan serta memberikan apresiasi terhadap penegakkan HAM, bukan sekedar menyiapkan sumber daya manusia untuk melanggengkan sistem terlebih-lebih sistem yang mapan (*statu quo*).⁴

Bidang layanan kesehatan masyarakat miskin dan kaya terlihat dibedakan, baik dalam proses administrasi yang begitu lama dan

³Roro Fatikhin, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Quran dan Pancasila", dalam *Panangkaran*, Vol 1, no 2 (2017), h. 296

⁴Syamsul Bakri, "Agama, Persoslan sosial dan Krisis Moral" dalam *Komunika*, Vol. 3, No. 1 Januari-Juni (2009), h. 2.

lambannya dalam proses penanganan yang diberikan. Tentu menjadi potret ketimpangan dalam penegakkan keadilan. Selain itu, dalam bidang pendidikan susahny mendapatkan jaminan pendidikan yang layak, dengan biaya yang mahal. Sehingga masih banyak masyarakat yang putus sekolah karena biaya yang dirasa terlalu mahal. Hal ini berimbas pada pendapatan perekonomian.⁵

Sistem monopoli dalam bidang ekonomi, masih terus berkembang, sehingga melumpuhkan pasar rakyat. Banyaknya ditemukan hypermarket dan supermarket sebagai pasar modern telah menyisakan dampak serius. Kemungkinan besar jumlahnya akan terus bertambah. Dampak negatif dari dari realitas diatas adalah: *pertama*, ketidakadilan dalam persaingan. Hadirnya supermarket dan hypermarket semakin gencar semakin memperparah kondisi pasar rakyat yang menjadikan pasar rakyat semakin termarginalkan. Pedagang-pedagang yang tidak mampu akhirnya gulung tikar ditengah perjalanan usahanya. Hal itu karena pedagang dipasar rakyat ini secara umum adalah pedagang-pedagang kecil bukan bukan pengecer raksasa seperti yang ada dipusat-pusat perbelanjaan modern. Ruang bersaing pedagang pada pasar rakyat kini juga mulai terbatas. *Kedua*, omset pasar rakyat semakin menurun. Tahun 90-an merupakan booming pasar modern. Masyarakat pun berbondong-bondong kepasar modern.

⁵*Ibid.,*

Tahun 2000-an, pasar tradisional semakin meredup dengan menjamurnya hypermarket.⁶

Selain itu, problem yang sangat besar dalam bangsa ini adalah KKN. Pemberantasan KKN seharusnya menjadi prioritas yang paling utama, baik dari teknis dan sistem maupun dari sisi moralitas dan agama. Jika tidak maka proses pembangunan bangsa dan masyarakat akan terganjal. Bahkan KKN menjadi akar persoalan bangsa karena KKN tidak sekedar mencuri uang, tetapi juga akan mengarah pada pembusukan moral dan merusak sistem yang berkeadilan dan bermartabat. KKN telah menjadi persoalan moral karena menjadikan pelaku tidak bermoral dalam berpikir, bertindak dan bersikap, di samping itu merugikan masyarakat dan bangsa.⁷

Problematika keadilan sejak dulu terus menjadi bahan kajian baik kalangan ahli filsafat, agamawan, politikus maupun para pemikir ataupun ahli hukum. Pertanyaan tentang keadilan tidak bisa ditentukan ukuran yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu adil ataupun tidak. Berbagai jawaban tentang keadilan biasanya tidak pernah atau jarang yang memuaskan sehingga terus menjadi perdebatan dengan demikian rumusan mengenai keadilan merupakan rumusan yang relatif. Persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan yang memberikan pandangan tentang konsep-konsep keadilan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan pertimbangan mereka sendiri.

⁶Yunie Herawati, Yunie Herawati, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, no. 1(2014), h. 20

⁷ Syamsul Bakri, “ Agama, Persolan sosial dan Krisis Moral” dalam *Komunika*, h. 3.

Jauh sebelum berbagai kalangan memberikan pandangan tentang keadilan, Islam telah mengatur sedemikian rupa, serapi dan seteratur dari yang dapat dibayangkan. Karena Islam adalah agama yang yang tidak berorientasi pada masalah akhirat saja, melainkan antara dunia dan akhirat juga harus seimbang.

Keadilan dalam Islam merupakan salah satu asas yang harus dijunjung oleh siapapun juga tanpa terkecuali. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Keadilan sosial merupakan sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akal, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-Adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁸

Sebagai sebuah undang-undang Islam mengatur semua sistem kehidupan manusia secara keseluruhan, tidak memecah persoalan - persoalan yang ada didalamnya secara acak, tidak juga menghadapinya

⁸Fauzi Al-Mubaraq, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", dalam *Istighna*, Vol I, no 2, (2018), h. 115 -116

sebagai bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Hal ini karena Islam memiliki konsep yang menyeluruh dan lengkap tentang alam, kehidupan dan manusia.⁹ Islam mengatur segala aspek kehidupan, maka Islam juga berbicara mengenai keadilan sosial untuk diwujudkan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil :

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadiorang- orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadisaksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorongmu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena itu lebih dekat dengan taqwa..”*¹⁰

Al-Qur'an menempatkan keadilan itu lebih kepada taqwa. Al- Quran menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari taqwa. Taqwa sendiri didalam Islam bukan hanya sebagai konsep ritualistik semata, melainkan juga secara integral terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi. Islam memandang hidup dari segala seginya. Bukan menekankan pada perhatian kepada satu bidang saja. Perbaikan ekonomi adalah salah satu cabang hidup. Oleh karena itu, dengan aturan ini termasuk ekonomi menjadi salah satu cabang yang akan diperbaiki.¹¹

Cendekiawan muslim terkemuka Dr. Prof Hamka yang hidup pada abad ke-20 merupakan salah satu tokoh muslim yang berpengaruh saat itu dengan teologi pembaharuannya. Hamka memberikan sebuah konsep

⁹ Sayyid Quthb, *al-Adalah al-Ijtima'iyah fil-Islam*, diterjemahkan oleh Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 1984), h. 24

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta, 2012), h. 108

¹¹ Hamka, *Keadilan sosial dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 2

bahwa keadilan sosial harus berdasarkan kepada al-Qur'an dan sunnah nabi. Dengan menjadikan al-Quran dan sunnah nabi sebagai pedoman keadilan sosial agar supaya kedepannya tidak merugikan pihak lain sebagaimana struktur kehidupan modern yang sedang berkembang saat itu.

Paham-paham lain seperti liberalisme, komunisme, facisme, sosialisme, dan kapitalisme sudah silih berganti berusaha mengatur kehidupan manusia dalam hal perekonomian khususnya. Namun semua paham itu adalah paham ciptaan manusia yang hanya menguntungkan satu pihak dan hanya akan merugikan pihak lain.

Hamka menjelaskan konsep-konsep keadilan sosial Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah nabi. Al-Qur'an tidak hanya saja sebagai pedoman hidup muslim, akan tetapi dengan isinya yang sangat relevan terhadap semua aspek kehidupan manusia baik muslim maupun non muslim.

Hamka menyebutkan bahwa keadilan sosial Hamka bertitik pada kebebasan jiwa, menurutnya dengan jiwa yang merdeka maka keadilan sosial dapat ditegakkan pula.¹² Latar belakang pemikiran Hamka tentang keadilan sosial adalah kehidupan sosial saat itu. Hamka secara detail menjelaskan kepada kita bahwa kedudukan jiwa yang bebas sangatlah penting untuk menegakkan agama ataupun keadilan sosial. Agama Islam tidak dapat tegak kalau tidak diperjuangkan.

¹²Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 74

Demikian sangat penting untuk mengkaji dan menganalisis secara kritis untuk mengetahui konsep pemikiran Hamka tentang keadilan sosial dalam Islam. Meskipun sebelumnya telah banyak penelitian-penelitian yang mengkaji pemikiran Hamka, akan tetapi belum banyak yang membahas tentang keadilan Sosial dalam Islam. Karena dari dulu sampai sekarang keadilan masih menjadi hal yang harus diperjuangkan.

Alasan memilih pemikiran Hamka tentang keadilan sosial dalam Islam adalah *pertama*, dalam pemikiran tersebut pemikiran ini mengandung konsep Islam. Kedua, pemikiran keadilan sosial dalam Islam merupakan jalan untuk membentuk masyarakat yang sejahterah dan seimbang, karena Islam merupakan agama yang universal. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti secara analisis kritis pemikiran Hamka tentang keadilan sosial dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud keadilan sosial dalam penelitian ini adalah kehidupan yang seimbang dalam masyarakat baik dalam bidang ekonomi, bidang hukum maupun bidang politik yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pemikiran Hamka tentang Keadilan Sosial dalam Islam?
- b. Bagaimana Relevansi Pemikiran Hamka Terhadap Problem Sosial di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendiskripsikan pemikiran Hamka tentang Keadilan Sosial dalam Islam
2. Mengetahui Relevansi Pemikiran Hamka Terhadap Problem Sosial di Indonesia

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat secara akademis dan manfaat secara praktik, seperti sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian secara akademis adalah sedikit sumbangsih dari peneliti dan terutama penyegaran kajian-kajian pemikiran yang selama ini banyak mengacu kepada pemikiran barat dan mengenai kebudayaan-kebudayaan setempat.
2. Manfaat penelitian ini secara prakmatik adalah peneliti berusaha memberikan tawaran atas pemikiran Hamka tentang keadilan sosial, agar masyarakat Islam mengacu kepada konsep keadilan sosial Islam yang tidak merugikan pihak lain dalam kehidupan sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian Ahmad Sirayudin 2015 dengan judul “*Konsep Etika Sosial Hamka*”. Penelitian ini berfokus pada etika sosial Hamka. Dalam

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hamka membagi etika menjadi dua konsep, yaitu konsep etika secara teoritis dan konsep etika secara praktis. Etika teoritis Hamka menjelaskan tentang bangunan konsep yang dimulai dari struktur eksistensial manusia, sebab etika manusia berangkat dari manusia itu sendiri. Karena bagi Hamka manusia merdeka dan bertanggung jawab melakukan segala tindakannya. Namun etika dapat berubah buruk apabila tidak dilandasi dengan dasar tauhid. Etika praktis, Etika Hamka dapat diterapkan pada hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari etika pemerintah, etika profesi, hingga etika pengarang. Hal ini bertujuan bahwa setiap tindakan manusia kelak dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Oleh sebab itu, tindakan manusia perlu diperhatikan dan lebih lebih harus diisi dengan perbuatan- perbuatan yang baik.

Penelitian Dartim, 2016, dengan judul *“Konsep Pendidikan menurut Islam* (telaah buku Falsafah Hidup dan Pribadi Hebat) dalam penelitian ini fokus pada pada konsep pendidikan Islam dalam pandangan Hamka tahun 1950-1980. Pendidikan dalam pandangan Hamka menekankan pada upaya maksimal dalam menumbuhkan dan penguatan pribadi. Pribadi individu yang mencakup pada akal, budi, cita-cita dan bentuk fisik seseorang yang harus dikembangkan semaksimal mungkin dan seutuhnya, cara pelaksanaan pendidikan dalam menumbuhkan pribadi individu dapat dilaksanakan dengan melatih berfikir dan melatih keterampilan bekerjanya dengan baik. Sehingga harapannya mampu

memberi manfaat dalam mempersiapkan generasi-generasi yang mandiri dan bertanggungjawab (manusia merdeka dan manusia masyarakat) yang mampu mengindahkan semua aturan nilai dan akhlak. Dengan demikian, pemikiran tersebut mampu memberi solusi alternatif dalam menyusun rumusan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional dan terlebih khusus pendidikan Islam dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai akhlak dengan moral dengan menyeimbangkan ranah *ta''lim, tarbiyah, ta''dib*.

Penelitian Anas Kurniawan, 2018, dengan judul "*Filsafat Cinta Ilahi dalam Pandangan Hamka*" dalam penelitian ini fokus pada Filsafat Cinta Hamka. Bagi Hamka cinta merupakan pandangan sekaligus filosofi kehidupan. Cinta menurut Hamka seutuhnya berasal dari satu rumpun yaitu cinta kepada Allah. Untuk meraih iman sejati, cinta juga harus tertumpah kepada Rasulullah Saw. Cinta kepada Allah, kita dapat mencintai alam, menikmati keindahannya, menghargai perbedaan sebagai rahmat dan memandang umat Islam itu satu adanya. Karena cintalah dunia terbentuk, karena cintalah harmoni antar kehidupan menjadi nyata dalam kehidupan. Jadi cinta tidaklah berarti menisbikan realitas sehari-hari.

F. Kerangka Teori

Sayyid Quthb memandang Islam adalah agama kesatuan antara ibadah dan muamalah antara akidah dan perbuatan, material dan spriritual, nilai-nilai ekonomi dan nilai-nilai moral, dunia dan akhirat, bumi dan langit. dari kesatuan besar ini kemudian muncullah ketentuan dan ketetapanannya, arah dan batas-batasannya, pandangan-pandangan, dalam

politik, pembagian harta rampasan, utang-piutang serta dalam hak dan kewajiban.¹³

Quthb mengartikan keadilan sosial dalam Islam itu adalah suatu persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas.¹⁴ Karena nilai-nilai itu menurut pandangan Islam banyak macamnya, maka keadilannya secara keseluruhan mudah dilaksanakan. Oleh sebab itu Islam tidak memaksa melakukan peraturan persamaan ekonomi.¹⁵

Keadilan yang mutlak pasti membutuhkan perbedaan imbalan, ada kelebihan sebagai bagian dari yang lainnya, disamping realisasi keadilan dalam segi kemanusiaan berupa pemberian kesempatan yang merata yang luas kepada masyarakat. Ia tidak boleh berhenti hanya dengan memperhatikan seorang individu saja, suku dan bangsanya, atau hanya dalam satu ikatan tertentu diantara ikatan yang lainnya. Ia harus memasukkan pula nilai-nilai yang lainnya, dengan memberikan kebebasan jiwa manusia dengan kebebasan yang penuh untuk mengimbangi nilai-nilai ekonomi yang murni lalu menempatkan nilai-nilai itu pada tempat yang benar dan rasional.¹⁶

Menurut Quthb Islam menegakkan keadilan sosial secara kokoh dengan menetapkan sarana tertentu untuk mencapai tujuannya. Maka dari itu Islam tidak membiarkan sedikit pun aturan yang tidak diketahui arahnya

¹³ Sayyid Quthb, *al-Adalah al-Ijtima'iyah fil-Islam*, diterjemahkan oleh Afif Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 33-34

¹⁴ *Ibid*, h. 37

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*, h.39

maupun ajaran-ajaran yang bersifat *mujmal* (global). Islam memiliki konsep dasar tentang alam semesta, kehidupan manusia, sedangkan keadilan sosial itu sendiri berada dibawah konsep dasar itu berada dalam tujuan universal.¹⁷

Pandangan Islam terhadap kehidupan manusia telah menjadikan keadilan sosial sebagai keadilankemanusiaan yang tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi semata. Bahkan antara persoalan materi dan immateri tidak dapat dipisahkan karenaitu merupakan satu kesatuan, dan peri kemanusiaan itu satukesatuan yang saling melengkapi serta serasi.

Menurut Quthb, keadilan sosial dalam Islam itu mencakup dua karakter, yaitu kesatuan dan harmoni. Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya dan dibawah arahan sang pencipta. Keadilan dalam Islam itu menyeimbangkan antara kapasitas dan keterbatasan manusia, individu dan kelompok masalah ekonomi dan spriritual, dan berbagai macam kemampuan individu. Ia berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia menjamin kehidupan minimum seseorang dan menentang kemewahan,tapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.¹⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam pandangan Quthb adalah keadilan yang berkonsep pada ajaran agama Islam. Demikian karena dalam Islam mengandung berbagai macam konsep

¹⁷*Ibid*, h. 41

¹⁸Taufik Rahman, “Teori Keadilan Sayyid Quthb”, dalam <http://insistnet.com/> diunduh pada tanggal 25 agustus 2020

yang dapat dijadikan sebagai undang-undang untuk mengatur kehidupan manusia baik muslim maupun non muslim.

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah proses penelitian ini, maka akan diberikan beberapa tahapan pada model penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian pustaka memiliki dua sumber yang menjadi rujukan kajian, yaitu data-data primer dan data-data sekunder. Data-data primer diambil sebagai objek material dalam buku *Keadilan Sosial dalam Islam*. Sedangkan data-data sekunder diambil dari data pustaka yang menunjang dan memperkuat objek material dan formal.

Penelitian ini juga penelitian historis-faktual yang membicarakan pemikiran Hamka tentang keadilan sosial dalam Islam. Selain mengambil data-data kepustakaan tentang keadilan sosial dalam Islam yang terdapat baik didalam karya asli Hamka sendiri maupun buku-buku lain yang masih ada kaitannya. Penelitian ini juga menyangkut sketsa biografi Hamka yang penulis gunakan untuk memotret kehidupan masyarakat pada masa itu.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dataprimer merupakan data utama yang berkaitan langsung dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data tersebut berupa buku karya Hamka yang berkaitan dengan keadilan sosial dalam Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung atau yang berkaitan dengan tema penelitian ini, baik berupa jurnal, artikel, majalah atau data lain yang mempunyai keterkaitan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah pemikiran Hamka yang termuat dalam buku-buku, jurnal, artikel maupun hasil analisis tokoh lain baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga membantu dalam proses analisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bermaksud untuk penelusuran literature primer dan literature sekunder yang memiliki keterkaitan secara relevansi pada objek penelitian. peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pemikiran keadilan sosial Hamka baik berupa buku, jurnal, artikel, majalah maupun data-data lainnya. Kemudian data dirangkum, dipilah dan dipilih sesuai dengan apa yang peneliti fokuskan.

Setelah merangkum data, peneliti melanjutkan dengan mengklarifikasi data yaitu mengelompokkan data berdasarkan ciri-ciri masing-masing sesuai objek formal yang diteliti. Data-data yang sesuai dengan data peneliti akan digunakan dan data-data yang kurang akan dikesampingkan agar peneliti lebih fokus. Setelah itu akan dilakukan klarifikasi data akan lebih terstruktur dalam penyusunan permasalahan dalam penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode historis digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran dan karya tokoh ataupun filosof.¹⁹ Metode analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti, atau cara penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.²⁰

Analisis yang tidak hanya berupa penjelajahan umum, melainkan analisis yang memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi

¹⁹ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 175.

²⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 59

sasaran studi, yakni dengan memfokuskan pada analisis kritis terhadap karya Hamka keadilan Sosial dalam Islam. Langkah-langkah dalam menganalisa data disesuaikan dengan pendekatan filosofis sebagai landasan metodologisnya. Adapun metode-metode yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode deskripsi

Metode Deskripsi adalah data dikumpulkan dan ditafsirkan, kemudian hasilnya dideskripsikan secara utuh dan lengkap. Metode deskripsi digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk menemukan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) dan penyusunan instrumen penelitian.²¹ Dalam metode ini, peneliti menguraikan secara teratur konsepsi pemikiran dari tokoh termasuk di dalamnya adalah biografi dari tokoh tersebut. Jika kajiannya berupa teks, maka diberikan gambaran yang jelas dan teratur tentang teks atau naskah tersebut.²² Peneliti mendeskripsikan pemikiran-pemikiran Hamka tentang Keadilan Sosial dalam Islam, kemudian dianalisis dan diinterpretasi serta memberikan kesimpulan.

b. Metode Kesenambungan Historis

Metode kesinambungan historis adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki keadaan khusus yang dialami tokoh,

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 388

²² Siti Nurlaili, Waryunah dkk, *Buku Panduan Skripsi*, (Sukoharjo: FUD Press, 2016), h.

dengan segi sosial-ekonomi, politik, budaya, sastra, maupun filsafat untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup tokoh, pendidikannya, pengaruh yang diterimanya, relasi dengan tokoh- tokoh lain sezamannya dan segala bentuk pengalaman yang membentuk pandangannya.²³

Metode kesinambungan historis digunakan untuk melihat benang merah pemikiran tokoh, baik yang berhubungan dengan lingkungan historisnya maupun pengaruh-pengaruh yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Serta menerjemahkan konteks pemikiran tokoh zaman dahulu dengan diterjemahkan ke dalam terminologi dan pemahaman yang aktual dan kekinian.²⁴ Metode kesinambungan historis di penelitian ini adalah digunakan untuk melihat benang merah pengembangan pemikiran Hamka, baik hubungannya dengan lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialami maupun dalam perjalanan hidup Hamka, baik latar belakang eksternal maupun latar belakang internal. Begitu pula perlu diperhatikan perkembangan intern tahap-tahap dalam pemikirannyatentangkeadilan sosial dalam islam.

c. Metode interpretasi

Metode interpretasi memiliki artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi bukan hanya merupakan kegiatan sesuka orang yang menafsirkan atau yang mengadakan interpretasi,

²³ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafa*, (Yogyakarta :Kanisius,1990), h. 70

²⁴*Ibid*, h. 28

melainkan harus bertumpu pada *evidensi objektif*, untuk mencapai kebenaran yang otentik. Dengan metode interpretasi ini diharapkan manusia dapat memperoleh pengertian pemahaman atau *verstehen*.²⁵ Dalam penelitian ini metode interpretasi digunakan untuk menyelami pemikiran Hamka tentang keadilan sosial dalam Islam.

1. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini dan supaya tulisan ini lebih tersusun maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam lima bab dengan sub-sub masing-masing bab.

Bab *pertama*, yang berisikan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, berisi tentang biografi Hamka yang terdiri dari riwayat hidup Hamka, Riwayat pendidikan dan perjuangan sertakarya-karyanya.

Bab *ketiga*, berisi tentang teori-teori keadilan

Bab *keempat*, berisi analisis atau hasil, yaitu hasil analisa dari penulis yang berkaitan dengan pemikiran Hamka tentang Keadilan Sosila

²⁵Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, h. 43

dalam Islam. Serta relevansinyadengan problem keadilan sosial di Indonesia.

Bab *kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

BIOGRAFI HAMKA

A. Riwayat Hidup

Hamka memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908. Hamka dilahirkan didesa kampong Molek, Mininjau, Sumatera Barat, dari pasangan Dr.H.Abdul Karim Amrullah dan Siti Safiyah binti Gelanggar yang bergelar Bagindonan Batuah.²⁶ Nama Hamka sebenarnya adalah Abdul Karim Amrullah sesudah menunaikan haji

²⁶Hamka, *Pandangan Hidup Muslim* (Depok : Gema Insani, 2016), h. 263

pada tahun 1927, sehingga didepannya tambah nama Haji Abdul Karim Amrullah seperti yang biasa kita sebut dengan Hamka.²⁷

Hamka sangat mewarisi darah ulama dan pejuang yang kokoh pendirian dari sang ayah yang dikenal sebagaimana dalam sejarah nasional, daerah Mininjau merupakan tempat dilahirkannya tokoh-tokoh politik, ekonomi, pendidikan, dan pergerakan Islam seperti Muhammad Natsir, A.R.Sutan Mansyur, Rusuna Said dan lain-lain.²⁸

Hamka adalah keturunan tokoh-tokoh ulama Minangkabau yang mana kesemuanya tidak memiliki paham keislaman yang sama, baik dalam masalah *furu'* maupun *ushul*. Syekh Muhammad Amrullah adalah penganut tarekat *Mu'tabarrah Naqsabandiyah* yang sangat disegani dan sangat dihormati bahkan dipercaya memiliki kekeramatan dan disebut-sebut sebagai wali. Masyarakat setempat sering kali mencari berkah melalui sisa makanan, sisa minuman atau sisa air wudhu, dan sebagainya.²⁹

Syekh Muhammad Amrullah mengikuti jejak ayahnya, Syekh Pariamandan saudaranya Syekh Gubug Katur. Ia pernah berguru di makkah dengan Sayyid Zaini, Syekh Muhammad Hasbullah, bahkan ikut belajar kepada mereka yang lebih muda, seperti Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Taher Jalaludin.

²⁷Bahrudin Rif dan Hasan Mud, *Filsafat Tasawuf* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h.

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*, h. 281.

Ayah Hamka sendiri, Syekh Abdul Karim Amrullah, yang biasa disebut sebagai haji Rasul, memiliki pemahaman yang berbeda dengan pendahulunya. Meskipun sama-sama belajar di Mekkah. Haji Rasul menolak praktik-praktik ibadah yang pernah dilakukan dan di dakwahkan ayah dan kakeknya. Beliau dikenal sebagai tokoh pembaharu (*at-tajdid*). Dalam kondisi dan situasi yang penuh dengan pertentangan antara kaum muda dan kaum tua. Di masa seperti itulah Hamka dilahirkan dan Hamka melihat sendiri perjuangan yang dilakukan ayahnya. Hamka banyak mengikuti cara berpikir ayahnya dalam memahami pokok-pokok agama Islam, meskipun memiliki perbedaan pada sisi pendekatan. Haji Rasul terkenal keras dan tegas. Sementara Hamka lebih santun.³⁰

B. Pendidikan Hamka dan Perjalanan kariernya

Hamka mengawali masa pendidikan didalam keluarga dengan pengawasan langsung dari ayahnya. Hamka mulai mempelajari al-Qur'an hingga usia 6 tahun. Ketika itu berpindah rumah dari Maninjau ke Padang Panjang pada tahun 1914. Setahun kemudian, ketika Hamka berumur 7 tahun ayahnya memasukkannya ke sekolah desa. Di sekolah desa itu Hamka hanya menjalani selama tiga tahun. Selain itu Hamka juga mendapatkan pendidikan disekolah sekitarnya (sekolah-sekolah di

³⁰*Ibid.,*

Padang Panjang dan Parabek dekat Bukit Tinggi) kurang lebih tiga tahun juga.³¹

Saat menginjak usia 10 tahun Hamka lebih memilih untuk mendalami ilmu agama di *Sumatera Thawalib* di Padang Panjang, sekolah Islam yang didirikan ayahnya sepulang dari Mekkah sekitar tahun 1906. Sejak itu Hamka menyaksikan kegiatan ayahnya dalam menyebarkan dalam penyebaran paham dan keyakinannya.³² Di sekolah itu Hamka mulai serius mempelajari agama Islam serta bahasa arab. Sejak kecil Hamka memang dikenal sebagai anak yang haus akan ilmu. Selain di sekolah ia juga menambah wawasannya di Surau dan Masjid dan dari sejumlah ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M.Sujopranoto dan Ki Bagus Hadi Kusumo.³³

Menurut Hamka pelajaran dengan metode menghafal itu sangat memusingkan kepala sehingga Hamka mengasingkan diri di perpustakaan Zainuddin Labay Elyunusi dan Bagindo Sindora. Hamka lebih asyik dalam ruangan perpustakaan secara formalitas pada perguruan tinggi.³⁴

Pada 1922 Hamka menyaksikan bagaimana ayahnya menyambut kedatangan guru dan sahabatnya, Syekh Thaher Jalaludin Al-Azhary dari Malaya. Pada 1922 pergerakan komunis datang ke Minangkabau,

³¹ Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta : Rebuplika, 2015), h. iii.

³² Rusidy Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: Mizan Publika, 2016), h.3.

³³ Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, h. 263.

³⁴ Firdausan, *Risalah Tauhid* (Jakarta : Bulan Bintang 1975), h. 51.

yang dipelopori oleh H. Datuk Batuah dan Natar Zainuddin.³⁵ Datuk Batuah adalah bekas guru utama dari Sumatera Thawalib. Namun pada tahun 1923 kedua pemimpin itu diasingkan Belanda ke Indonesia Timur yang satu ke Kalabehi dan satu nya lagi ke Fanunu. Selanjutnya di pindahkan ke Digoel.³⁶

Ketika usia Hamka menginjak 16 tahun pencarian ilmunya ia lanjutkan dengan berhijrah ke Jawa, Yogyakarta. Pada tahun 1924 di Jawa Hamka berinteraksi dengan beberapa tokoh seperti H.O.S.Tjokroaminoto, H.Fakhrudin, R.M.Suryopranoto dan AR.Sutan Mansur yang saat itu masih ada di Pekalongan. Di Yogyakarta Hamka mulai mempelajari pergerakan-pergerakan Islam modern.³⁷ Mereka semua mengadakan kursus-kursus pergerakan di Gedoeng Abdi Pakualaman, Yogyakarta. Dari mereka itulah Hamka dapat mengenal perbandingan antara politik Islam, yaitu syariat Islam Hindia Timur dan gerakan sosial Muhammadiyah.³⁸

Hamka melanjutkan pengembaraannya ke Pekalongan selama kurang lebih enam bulan dan bertemu A.R.Sutan Mansur. Menantu ayahnya yang menetap di Pekalongan. Pada usia 16 tahun Hamka telah berpidato dimana-mana dengan jiwa yang semangat dengan kesadaran baru itu. Pada usia 17 tahun ia telah kembali ke tanah Minang, Hamka tumbuh menjadi pemimpin dilingkungannya. Aktifitasnya sebagai

³⁵ Rusdy Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, h.3.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Hamka, *Tasawuf Modern*, h. iv.

³⁸ Rusdy Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, h. 4.

orang pergerakan yang telah tertanam jiwanya sejak tinggal di Yogyakarta membuat Hamka tidak tinggal diam ditengah suci. Sesudah Hamka berangkat dari tanah air pada tahun 1927 bersama beberapa calon Jemaah lainnya Hamka mendirikan Organisasi persatuan Hindia terutama manasik haji, kepada calon Jemaah haji asal Indonesia.³⁹

Para sejarawan mengenal Hamka dengan semangat otodidiknya yang gigih. Ia mempelajari sendiri buku-buku yang menurutnya penting. Ilmu-ilmu seperti falsafah, kesustraan, sejarah sosiologi dan politik baik yang datang dari Islam maupun Barat kemudian ditelaahnya dengan bermodal pendidikan yang pernah diterimanya.⁴⁰ Berkat kegigihannya menelaah buku dalam segala aspek mengantarkan Hamka kepada pribadi yang *multidimensional*. Pemikiran dan perjuangan Hamka menurut Burhanudin sangat dipengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh.⁴¹

Secara formal, pendidikan Hamka memang tidak begitu tinggi, hanya sampai dengan kelas tiga sekolah desa, lalu sekolah yang ia jalani di Padang Panjang dan Parabek juga tidak lama, kurang lebih selama tiga tahun juga. Dengan begitu, ia tidak mempunyai ijazah, karena tidak ada satupun sekolah yang Hamka selesaikan.⁴²

³⁹Usep Taufik Hidayat, "Tafsir Al- Azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka", dalam *Al Turas*, Vol. XXI, No. 1 ,(2015), h. 52-53.

⁴⁰Bahrudin Rif dan Hasan Mud, *Filsafat Tasawuf*, h. 282.

⁴¹ *Ibid.*

⁴²Herry Mohammad, dkk, *Tokoh - Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta : Gema Insani, 2006), hal. 60.

Meskipun tidak mendapatkan ijazah, itu tidak menghalangi Hamka untuk tetap maju, bahkan John L. Espito dalam *Oxford History of Islam* menyejajarkan sosok Hamka dengan Sir Muhammad Iqbal, Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Asad.⁴³

Hamka pernah menekuni bidang jurnalistik dengan berkarir sebagai wartawan, penulis, editor dan penerbit sejak awal tahun 1920 an. Ia pernah tercatat menjadi wartawan berbagai surat kabar, yaitu: *Pelita Andalas*, *Serua Islam*, *Bintang Islam* dan *Seruan Muhammadiyah*.⁴⁴ Disela kegiatannya sebagai jurnalis, Hamka memulai kiprahnya di dunia politik dengan menjadi anggota partai Sarekat Islam pada tahun 1925. Pada waktu itu hampir bersamaan ia ikut mendirikan Muhammadiyah untuk menentang khurafat, bid'ah dan kebatinan sesaat di Padang Panjang.⁴⁵

Tahun 1935 Hamka mendirikan *Khaliyyatul Mubalighin*. Namun pada tahun itu juga ia harus ke Makasar karena kehadirannya sangat dibutuhkan dalam misi pembuatan karya tulis. Hamka tinggal disana selama tiga tahun. Saat di Makasar, Hamka menulis surat kabar yang beredar di Medan dan di Jakarta. Tahun 1936 Hamka pindah ke Medan juga.⁴⁶ Di kota ini Hamka pindah bersama M. Yunan Nasution

⁴³Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, h. 264.

⁴⁴*Ibid.*,

⁴⁵*Ibid.*,

⁴⁶Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, h. 164.

menerbitkan majalah *Pedoman Masyarakat*. Majalah yang tidak kecil memuat andil bagi kepengarangan dan kepunjagaan.⁴⁷

Majalah *Pedoman Masyarakat* ini dibekukan untuk sementara selama perang dunia kedua.⁴⁸ Pasca perang dunia kedua tahun 1945 Hamka kembali ke Padang Panjang. Saat itulah bakatnya sebagai pengarang mulai tumbuh.⁴⁹ Buku pertama yang dikarangnya berjudul *Khatibul Ummah*, yang kemudian disusul dengan sederet judul lain yakni *Revolusi Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Naskah Renville, Muhammadiyah melalui 3 Zaman, Dari Lembah Cita-Cita, Merdeka, Islam dan Demokrasi, Dilamun Ombak Masyarakat dan Menunggu Beduk Berbunyi*.⁵⁰

Antara tahun 1945-1949 Hamka ditunjuk sebagai sekretaris untuk Front Pertahanan Nasional (PETA) Sebagai partai politik yang menguasai di Sumbar untuk melawan Belanda yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Kemudian Hamka membentuk Badan Pembela Negara dan Kota (BPNK) yang merupakan gerakan masyarakat yang gerilyawan terbesar dalam melawan Belanda. Selama posisinya tersebut Hamka tidak pernah tinggal disatu kota dalam jangka waktu yang lama.

51

⁴⁷Usep Taufik Hidayat, Tafsir Al- Azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka”, dalam *Al Turas*, Vol. XXI, No. 1 ,(2015), h. 53.

⁴⁸*Ibid*, h. 54.

⁴⁹Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, h. 265.

⁵⁰*Ibid*,.

⁵¹Usep Taufik Hidayat ,Tafsir Al- Azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka”, dalam *Al Turas*, Vol. XXI, No. 1 ,(2015), hal 54.

Pasca kemerdekaan, Hamka tinggal di Jakarta dan meneruskan aktifitas menulis literatur dan budayanya disana. Hamka mengikuti pemilu tahun 1955 dibawah partai Islam Masyumi dan terpilih sebagai anggota dewan konstituante. Saat itu, Hamka menemukan adanya gerakan komunisme secara terbuka dan menyebar paham ateis ditengah-tengah masyarakat. Pada tahun 1959 partai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno karena kemajuan Sumbar melibatkan pada pemimpinnya. Selain Hamka diantaranya Muhammad Natsir dan Syafrudin Prawiranegara.

Hamka kemudian terlibat dalam kepengurusan organisasi Islam tersebut dari tahun 1928 hingga tahun 1953. Bersama dengan K.H Fakhri Usman (Menteri Agama dalam Kabinet Wilopo 1952) Hamka menerbitkan majalah tengah bulanan *Panji Masyarakat* pada Juli 1969. Majalah ini menitik beratkan soal-soal- kebudayaan dan pengetahuan agama Islam. Majalah ini kemudian diberesdel pada 17 Agustus 1960 dan diterbitkan setelah orde lama tumbang, tepatnya tahun 1967. Hamka sendiri dipercaya sebagai pemimpin umum Panji Masyarakat hingga akhir hayatnya.⁵²

Hamka kembali ke dunia pendidikan tahun 1957 setelah resmi diangkat menjadi dosen di Universitas Islam Jakarta dan di Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang. Kariernya sebagai pendidik terus berlanjut setelah Hamka terpilih sebagai Rektor pada perguruan tinggi

⁵² Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, h. 264.

Islam Jakarta kemudian dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Maestopo Jakarta dan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Disamping sering memberikan kuliah di berbagai Perguruan Tinggi, Hamka juga menyampaikan dakwahnya melalui kuliah subuh RRI Jakarta dan mimbar agama Islam TVRI yang diminati jutaan masyarakat Indonesia pada masa itu.⁵³

Pada tahun 1964 Hamka di penjara dengan alasan telah melakukan *subversive*. Majalah *Panji Masyarakat* karyanya dihentikan karena menerbitkan artikel Mohammad Hatta mengkritik Soekarno.⁵⁴ Selama dalam penjara tersebut Hamka menghasilkan karya fenomenalnya yaitu tafsir Al-Azhar. Sampai hari ini tafsir Al-Azhar adalah satu- satunya tafsir Al-Quran yang ditulis oleh ulama melayu dengan gaya bahasa yang khas dan mudah dicerna.⁵⁵ Kemudian Hamka dibebaskan setelah berakhirnya kekuasaan Orde lama Soekarno pada 1966.⁵⁶ Pada 1967, setelah Orde Baru kembali tegak dibawah presiden Soeharto. Majalah *Panji Masyarakat* kembali diterbitkan, dan Hamka ditunjuk menjadi pemimpin umumnya. Hamka menjabat posisi itu sampai akhir hayatnya.

57

⁵³*Ibid*, h. 265.

⁵⁴Usep Taufik Hidayat, Tafsir Al- Azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka”, dalam *Al Turas*, Vol. XXI, No. 1 ,(2015), h.54.

⁵⁵Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, h. 265.

⁵⁶Rusidy Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, h. 10.

⁵⁷*Ibid*,.

Pada tahun 1975 Hamka ditawari menjadi ketua MUI oleh Menteri Agama.⁵⁸ Dalam pidato penerimaannya beliau mengingatkan agar para pemimpin memperhatikan keseimbangan terutama perkembangan spiritual. Hamka bisa memberikan saran kepada pemerintah dan mengatur posisinya. Namun demikian Hamka cenderung untuk terjun kedalam politik selama lima tahun dan bersebrangan dengan pemerintah yang membolehkan Natal bersama. Hamka meninggal tahun 1981 pada bulan Ramadhan.

C. Karya-Karya Hamka

Haji Abdul Karim Amrullah atau lebih di kenal sebagai sebutan Hamka termasuk penulis yang sangat produktif. Ia telah berhasil menulis dalam berbagai bidang, seperti Filsafat, sejarah, akhlaq, tafsir, sastra dan lain-lain. Adapun karya yang berhasil di tulis kan Hamka adalah sebagai berikut, Dalam bidang sastra diantaranya: *Merantau ke Deli* (1977), *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1979), *Di Bawah Lembah Kehidupan* (1979), *Tenggelamnya Kapal Van De Wijck* (1979), *Menunggu Beduk Berbunyi* (1949), *Mandi Cahaya di Tanah Suci* (1950), *Laila Majnun* (1932), *Terusir* (1930), *Tuan Direktur* (1939).

Bidang Filsafat diantaranya: *Falsafah Hidup* (1970), *Lembaga Budi* (1981), *Lembaga Hidup* (1940), *Negara Islam* (1946), *Islam dan Demokrasi* (1946), *Revolusi Pikiran* (1946), *Revolusi Agama* (1946), *Dibanting Ombak Masyarakat* (1946), *Mengembara dilembah Nil*

⁵⁸Hamka, *Tasawuf Modern*, h. vi.

(1950), *Ditepi Sungai Dajlah* (1950), *Falsafah Ideologi Islam* (1950),
Urat Tunggang Pancasila (1952), *Merdeka* (1946).

Bidang Tasawuf: *Tasawuf Modern* (1981), *Tasawuf Perkembangan dan Kemurniannya* (1981), *Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya* (1973), *Renungan Tasawuf*.

Bidang Sejarah: *Sejarah Umat Islam*, (1974), *Kenangan-kenangan Hidup 1*, Autobiografi Sejak Lahir 1908-1950, *Antara Fakta Tuanku Rao*, (1974), *Pribadi* (1950), *Pembela Islam* (1929), *Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq*, *Ayahku* (1950).

Bidang Agama: *Lembaga Hikmah* (1975), *Bohong di Dunia*, (1979).
Khatibu Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam Huruf Arab. *Kepentingan Melakukan Tabligh* (1929), *Keadilan Ilahi* (1939), *1001 Soal Hidup* (Kumpulan Karangan dari Pedoman Masyarakat, dibukukan 1950).
Kedudukan Perempuan Dalam Islam (1973), *Pedoman Mubaligh Islam*, Cet. I (1937) ; Cet. II (1950), *Agama dan Perempuan* (1939), *Pelajaran Agama Islam* (1956), *Islam dan Kebatinan* (1972) *Pandangan Hidup Muslim* (1960), *Hak Asai Manusia Dipandang Dari Segi Islam* (1968), *Keadilan Sosial Dalam Islam* (1950), *Sekembali dari Makkah. Studi Islam* (1973), *Ghirah* (1949)

Bidang adat: *Adat Minangkabau dan Agama Islam* (1929), *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* (1946). Dalam Bidang Tafsir: *Tafsir Al-Azhar juz 1-30*. Di tulis saat di penjara.

Hamka meninggalkan karya yang sangat banyak, diantaranya, yang sudah dibukukan tercatat lebih kurang 118 buah. Karya-karyanya banyak tentang kajian, Politik, Sejarah, Budaya, Akhlak, dan Tafsir.⁵⁹ Melalui karya-karya tersebut Hamka banyak mempengaruhi cendekiawan Indonesia, baik dalam bidang agama, sosial, politik bahkan pemikiran dalam pembaharuan Islam.

BAB IV

ANALISIS KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM PANDANGAN HAMKA DAN RELEVANSINYA TERHADAP PROBLEM SOSIAL DI INDONESIA

A. Konsep Keadilan Sosial dalam Islam Menurut Hamka

⁵⁹ Tim Penyusunan, *Ensiklopedi Islam*, j.2. c, 9 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).

Pembahasan mengenai keadilan sosial setidaknya Hamka membagi kedalam tiga pokok pembahasan yaitu bidang ekonomi, hukum dan politik pemerintahan.

1. Keadilan dalam bidang ekonomi

Islam memandang ekonomi sebagai bagian dari kehidupan, bukan ekonomi untuk kehidupan, hal ini dikarenakan Islam memandang segala suatu secara komperhensif (*kulli*) dan menyeluruh (*syamil*) maka dari itu segala kebijakan (dalam level makro) dan tindakan (dalam level mikro) harus mendasarkan kepada apakah kebijakan tersebut merugikan orang lain bahkan merugikan diri sendiri.⁶⁰

Menurut Hamka ekonomi adalah salah satu cabang dalam kehidupan.⁶¹ Islam memandang harta sebagai sesuatu yang sangat penting, sebab keberadaannya mempengaruhi seseorang untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Dalam melaksanakan ibadah sholat misalnya, seorang muslim membutuhkan pakaian, alas kaki, sajadah, masjid ataupun mushola, begitu pula ibadah puasa dan juga haji, kesemuanya membutuhkan harta.

Islam hadir bukan untuk satu golongan melainkan sebagai wahyu Allah untuk keselamatan umat manusia seluruhnya. Dalam Islam segala amal usaha tidak dapat dilancarkan kan jika tidak ada harta

⁶⁰ Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 1-2.

⁶¹ Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 3.

benda, rukun-rukun dan perintah agama tidak pula dapat dijalankan jika tidak ada harta benda.

“Sholat haruslah berpakaian dan beralas, bersajadah bermasjid, dan surau yang teratur semuanya adalah harta benda. Puasa bulan Ramadhan hanya disiang hari, sedangkan malam hari digumakan untuk beribadah. Namun dalam prakteknya ibadah tidak dapat dijalankan jika persediaan (*voorraad*) tidak ada. Zakat adalah harta benda. Ibadah haji akan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya harta benda”⁶²

Hamka berpandangan bahwa muslim haruslah kaya, karena dengan kekayaan itulah agama dapat ditegakkan. Masjid yang lapuk merupakan tanda kemiskinan suatu masyarakat. Agama Islam akan dapat tegak dan tidak akan sempurna jika tidak diperjuangkan (jihad) dan jihad memerlukan biaya.⁶³ Allah berfirman dalam Q.S at-Taubah ayat 41 yang menjelaskan tentang pentingnya berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa,

“Berangkatlah kamu dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwamu di jalan Allah yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.⁶⁴

Ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya harta bagi seorang muslim untuk menegakkan agama Allah. Agama tidak akan tegak jika tidak diperjuangkan.

Menurut Hamka, kepemilikan harta yang sebenarnya hanyalah milik Allah SWT. Adapun manusia sebagai individu ataupun kelompok (masyarakat) hanya memiliki hak untuk

⁶² Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, 73.

⁶³ *Ibid*, h. 74.

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid* (Bogor: Sigma, 2007), h.194.

menggunakan dan memelihara sebagai wakil Allah dimuka bumi ini, dan harta hanyalah pinjaman.⁶⁵

Harta benda yang ada pada manusia hanyalah milik Allah semata, manusia hanya sebagai khalifah atau wakil yang dititipi untuk menjaga harta, menggunakan harta sebaik mungkin untuk melakukan perbuatan yang mulia karena kelak setiap manusia akan diberi balasan atas apa yang dilakukannya selama didunia.

Sementara itu dalam kepemilikan harta dan penggunaanya dalam bidang ekonomi memiliki persamaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 7:

*“Bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagianya pula dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”*⁶⁶

Warisan yang telah diterima dari orang-orang yang telah meninggal telah di atur dalam hukum *faraidh* adalah sumber harta yang di iijinkan agama. Agama Islam bukan hanya mengatur peribadatan, melainkan mengatur masyarakat secara jelas. Dalam penyusunan penerimaan harta peninggalan orang tua atau kerabat ada yang menerima separuh, dua pertiga, sepertiga, seperenam, menerima sepenuhnya dan lain-lain.⁶⁷

⁶⁵ Hamka, *keadilan Sosial dalam Islam*, h. 78.

⁶⁶ Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tajwid*, (Bogor: Sigma, 2007), h. 78

⁶⁷ Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 90

Adapun tentang kelipatan bagian laki-laki dari wanita dalam warisan maka merujuk pada watak kaum pria dalam kehidupannya ia menikasi wanita dan bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga selain bertanggungjawab terhadap sesuatu yang berkaitan dengan keluarganya itu. Sedangkan wanita, bila bersuami maka seluruh kebutuhannya di tanggung oleh suami. Sedangkan bila masih gadis atau janda maka kebutuhannya terpebuhi dengan harta warisan tersebut.⁶⁸ oleh karena itu laki-laki berhak mendapatkan bagian lebih besar karena perbedaan karakteristik dan tanggungjawab yang diembannya.

Hamka juga menyebutkan bahwa laki-laki menerima dua kali dari apa yang diterima wanita, sebagaimana di jelaskan Hamka sebagai berikut :

“Anak laki-laki menerima dua kali yang diterima anak perempuan. Jika ada yang erasa musykil mengapa anak perempuan hanya mendapatkan separuh dari yang didapat oleh anak laki-laki telah pula kita terangkan bahwa anak perempuan dalam pandangan islam tidak boleh lepas dari penjagaan dan pemeliharaan laki- laki”⁶⁹

Peraturan warisan dapat islam digunakan sebagai salah satu alat untuk memecahkan sebab-sebab yang menumbuhkan bibit kapitalisme. Kekayaan yang tadinya berlonggak dalam satu tangan, setelah pemiliknya meninggal harus dipecah kepada alhi waris.⁷⁰ Demikian peraturan waris dalam menciptakan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dimulai dari keluarga, karena

⁶⁸ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 71

⁶⁹ Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 90.

⁷⁰ *Ibid*, h. 91.

keluarga merupakan tempat pertama sebuah keadilan itu diciptakan.

Telah menjadi hukum alam (*sunnatullah*) bahwa jika ada sesuatu yang masuk, maka harus ada sesuatu yang dikeluarkan, menghirup udara harus mengeluarkannya, meminum air harus mengeluarkannya, memakan makanan harus dikeluarkan dan lain sebagainya. Jika mekanisme tersebut tidak berjalan, maka ada pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan normal. Islam memberi beberapa aturan cara unruk memperoleh harta. Sebagaimana di atur pula kemana harta tersebut harus di belanjakan sehingga kekayaan tidak sampai merusak dan merugikan masyarakat.⁷¹

Setiap orang akan memperoleh dari apa yang mereka usahakan. Sebagimana yang terdapat dalam QS. An-Najm ayat 39 yaitu :

“dan bahwa manusia akan memperoleh dari apa yang diusahakannya”.

Ada banyak usaha yang dapat dilakukan untuk memperoleh harta, diantaranya :

- 1) Berburu dan mengail
- 2) Pertanian
- 3) Rikaz
- 4) Rampasan perang

⁷¹*Ibid*, h. 81.

- 5) Upah mengupah dan usaha merdeka
- 6) Tanah ketentuan pemerintah
- 7) Warisan dan wasiat
- 8) Zakat

Menurut Hamka Islam memberikan kesempatan yang sangat luas bagi setiap orang untuk berusaha dan berusaha. Selain itu diberi juga di beri kesempatan untuk mengelolah harta bendanya tetapi dengan aturan-aturan Islam.⁷² Manusia memiliki akal yang dapat digunakan untuk mencari rezeki yang telah diberikan Allah. Oleh karena itu kita sebagai manusia haruslah selaluberusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi agar kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin.

Mengenai keadilan sosial dalam Islam di bidang ekonomi, Quraish Shihab sebagai mufassir memberikan pendapat mengenai hal tersebut, menurutnya tidak semua persoalan terutama ekonomi terperinci dalam al-Quran, karena persoalan ini terus berkembang dari masa ke masa. Oleh karena itu al-Quran hanya memberikan tuntunan umum berupa prinsip-prinsip dasar yang dapat di jabarkan umat sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial dan perkembangan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar islam dapat disimpulkan pada keyakinan tauhid.

⁷²Hamka, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, h. 94.

Kemudian lahirlah prinsip bukan saja dalam bidang ekonomi, melainkan juga menyangkut aspek kehidupan dunia akhirat.⁷³

Quraish Shihab menyatakan bahwa secara umum prinsip ekonomi Islam terangkum dalam empat prinsip pokok yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggungjawab.⁷⁴ Sistem perekonomian Islam secara mutlak bersumber pada al-Qur'an dan sunnah nabi yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Sistem ekonomi Islam ini segalanya pada akidah Islam.⁷⁵ Ekonomi Islam secara mendasar tentu berbeda dengan sistem ekonomi yang lainnya dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecah masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis dan komunis. Al-Qur'an dalam semua uraiannya, termasuk dalam bidang ekonomi selalu memandang manusia secara utuh, sehingga al-Quran memaparkan ajarannya dengan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat.

Keadilan sosial dalam Islam di tegakkan oleh seluruh masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Oleh karena itu semua hak-hak merata kepada semuanya dalam artian bahwa Islam memberikan hak yang penuh kepada setiap individu. Keadilan dalam pandangan sayyid

⁷³ M. Quraish Shihab, *Menebar Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h.197.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2011), 409.

⁷⁵ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 3.

Quthb adalah persamaan kemanusiaan yang memperlihatkan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Setiap individu memperoleh kesempatan yang penuh, kemudian membiarkan melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan yang mulia.⁷⁶ Untuk itu setiap individu memiliki kesempatan yang sama.

Islam memandang kehidupan secara seimbang. Antara kehidupan material dan spiritual haruslah seimbang. Menurut Quthb hal ini sangat kontradiksi dengan apa yang dipahami oleh komunisme yang menjunjung setinggi-tingginya kebebasan ekonomi diatas segalanya.⁷⁷ Menurutnya kebebasan ekonomi haruslah diimbangi dengan kebebasan jiwa setiap individu.

Keadilan komunisme dalam bidang ekonomi adalah persamaan imbalan tanpa ada perbedaan sedikitpun dari segi ekonomi. Sekalipun harus berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu.⁷⁸ Itu artinya bahwa komunisme tidak memberikan kebebasan jiwa kepada setiap individu.

Oleh karena itu Islam mengatur dan memperhatikan nilai-nilai ekonomi Islam. Menurut Quthb keadilan dalam bidang ekonomi itu sangat menjamin dan melindungi hak dari pencuri, perampasan

⁷⁶ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h 37.

⁷⁷ *Ibid*, h. 44.

⁷⁸ *Ibid*, h. 47.

ataupun penipuan dengan berbagai cara, dan menetapkan hukuman atas kejahatan mengincar harta kekayaan orang lain.⁷⁹

Tidak berbeda dengan Hamka, Quthb mengatakan bahwa harta akan menumbuhkan egoisme, kemewahan akan menyebabkan kesombongan.⁸⁰ Oleh karena itu zakat merupakan solusi yang tepat untuk mensucikan jiwa dari sifat-sifat tersebut.

Quthb menyebutkan bahwa zakat merupakan rukun sosial yang nyata diantara rukun Islam. Dan zakat merupakan bagian yang paling penting dalam politik kepemilikan dalam Islam.⁸¹ Islam sangat membenci kemiskinan bagi manusia, Islam menghendaki agar manusia bebas dari tekanan kebutuhan-kebutuhan hidup material sehingga manusia mempunyai waktu yang cukup untuk hal-hal yang lebih luhur dan agung, yang lebih patut bagi kemanusiaan dan kemuliaan.⁸²

Hamka dan Quthb memiliki pemikiran yang sama dalam hal keadilan dalam bidang ekonomi. Setiap manusia memiliki jaminan kepemilikan harta. Harta akan menumbuhkan sifat sombong bagi manusia. Oleh sebab itu zakat adalah solusi untuk mensucikan jiwa dari sifat-sifat tersebut. Selain itu zakat juga sebagai gerakan sosial yang nyata dalam Islam yang dapat mensejahterakan masyarakat karena harta terus berputar dan tidak berkutat pada orang saja.

⁷⁹*Ibid*, h. 142.

⁸⁰*Ibid*, h. 185.

⁸¹*Ibid*.

⁸²Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 186

2. Keadilan bidang hukum

Keadilan hukum tidak dipengaruhi oleh apapun yang mencoba menghalangi tegaknya sebuah keadilan, baik harta maupun keturunan.

Seperti yang diungkap oleh Quthb:

“Disini setiap individu menikmati keadilan yang sama tidak ada diskriminasi antara mereka yang muncul karena nasab dan kekayaan, karena uang dan pangkat sebagaimana ada pada umat diluar Islam walaupun antara kaum muslimin dan nonIslam itu terdapat permusuhan dan kebencian. Sungguh ini merupakan nilai keadilan yang belum pernah dicapai oleh hukum internasional manapun dan juga oleh hukum lokal manapun sampai detik ini”⁸³

Islam memberikan kebebasan yang kuat bagi masyarakat. Namun tidak ada kebebasan mutlak tanpa batas. Seperti yang di jelaskan Hamka bahwa kemerdekaan manusia, menurut ajaran Islam dihipunkan kedalam kekuasaan Allah. Oleh sebab itu dalam Islam tidak ada kebebasan yang mutlak, kebebasan tanpa memperdulikan yang lain.⁸⁴

“Tidaklah ada yang merdeka dalam alam ini. Islam harus tunduk kepada aturan. Barangsiapa yang melanggar aturan, binasalah dia. Matahari, bulan, bintang dan bumi yang begitu besar, bermiliar kali lebih besar daripada kehidupan manusia, tidak juga merdeka berjalan sendiri-sendiri. Tidak satu saat pun cakrawala bebas keluar dari garis aturan. keluar dari garis aturan adalah kebinasaan”.⁸⁵

Menurut Hamka, kemerdekaan yang ideal itu antara hak dan kewajiban haruslah seimbang. Untuk mengatur keadilan pribadi dan masyarakat, Negara berkewajiban memberikan jaminan kemerdekaan masyarakat agar tidak dikalahkan oleh kemerdekaan pribadi.⁸⁶ Islam haruslah masuk ke dalam masing-masing jiwa manusia. Kepentingan

⁸³ *Ibid*, h. 130.

⁸⁴ Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h.43

⁸⁵ *Ibid*, h.44.

⁸⁶ *Ibid*, h. 46.

diri sendiri harus diserahkan kepada kepentingan bersama, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah.

Siasat hukum dalam Islam untuk menjaga dan memberi keadilan rakyat harus taat terhadap pemimpin. Dalam hadis nabi Muhammad Saw. Yang di kutip oleh Hamka diriwayatkan oleh Bukhari dijelaskan bahwa:

“Dengarlah dan taatilah walaupun yang diangkat menjadi pemerintahanmu seorang budak Habsyi! seakan-akan kepalanya (lantaran keriting rambutnya), serupa Anggur keriting. Selama ia masih mendirikan kitab Allah.”⁸⁷

Setiap individu memiliki kebebasan, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan orang lain. Menurut Quthb, kehidupan tidak

dapat ditegakkan bila setiap anggota masyarakat ingin menikmati kebebasan mutlak tanpa batas dan arah tertentu. Dimana setiap orang mendapatkan kebebasan mutlak, terbebas dari segala bentuk tekanan dan memperoleh kesamaan penuh yang tidak disertai ikatan dan syarat apapun. Keadaan seperti ini menurut Quthb merupakan jaminan bagi

hancurnya anggota masyarakat itu sendiri.⁸⁸ Dalam artian bahwa kebebasan yang diberikan oleh Islam adalah kebebasan yang bersyarat.

Islam agama yang universal akan memberikan keadilan yang sama bagi semua segi kehidupan. Sebagaimana Hamka hukum haruslah seimbang, tidak miring dan tidak pula dipengaruhi oleh apapun, jika sesuatu itu benar maka itu benar, begitu juga sebaliknya. Penegakan

⁸⁷*Ibid*, h.51.

⁸⁸Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 79.

keadilan hukum tidak dapat dihalangi oleh apapun baik harta maupun keturunan.

Hukum dalam Islam menurut Hamka disebutkan beberapa hukum mengenai kejahatan, yang terkenal ialah hukuman rajam bagi pezina, hukum potong tangan bagi pencuri dan hukum potong tangan beserta potong ujung jari bagi perampok. Kemudian terjadi juga beberapa perkara yang tumbuh dalam masyarakat, seperti minum khamr, homoseks dan lain-lain.⁸⁹

Islam memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan berguna supaya kejahatan yang dilakukan tersebut tidak dilakukannya berulang kali. Dengan dilakukannya kejahatan berulang-ulang maka keadilan sosial susah ditegakkan.

3. Keadilan politik pemerintahan

Sistem politik pemerintahan Islam menurut Hamka bermula dari kebersihan jiwa dan undang-undang. Pendirian masyarakat atau Negara bermula dari dalam jiwa manusia. Sifat-sifat kelemahan diri manusia seperti hawa nafsu dan syahwat yang senantiasa selalu bergejolak dapat di atur dan dikendalikan dengan ajaran-ajaran suci sehingga terbentuk masyarakat yang adil.⁹⁰

Islam memandang hidup dari segala aspek kehidupan. Bahkan hal-hal kecil pun yang merugikan orang lain diberikan peringatan.

⁸⁹ *Ibid*, h. 59.

⁹⁰ *Ibid*, h. 2.

“mengintip-intip mengorek-gorek rahasia diri orang lain, mengunjing dan membicarakan dibelakangnya adalah bahaya besar yang menimpa masyarakat. Hal ini senantiasa menjadi menjadi permulaan dari hilangnya perasaan keamanan diri sendiri bukankah ini penyakit yang selalu memutuskan hubungan kasih sayang dan hormat – menghormati dalam masyarakat bernegara?”⁹¹

Penyakit-penyakit diatas dalam pandangan Hamka jika dapat dikendalikan maka masyarakat adil dan makmur bisa diciptakan. Tetapi zaman sekarang penyakit-penyakit tersebut dapat digunakan untuk membongkar rahasia pribadi lawan politik, yang merupakan setengah kebebasan demokrasi.⁹² Dimulai dari hak diri dan hak rumah merupakan tempat awal tegaknya keadilan sosial.⁹³ Menurut penjelasan Hamka bahwa politik pemerintahan Islam dibangun atas tiga asas; pemimpin yang adil, rakyat yang taat dan musyawarah untuk mufakat.⁹⁴

Munawir Sjadzali menjelaskan bahwa seorang penguasa harus adil secara mutlak, keputusan dan kebijakannya tidak terpengaruh oleh perasaan senang atau benci, suka ataupun tidak suka, hubungan kerabat, suku dan hubungan-hubungan khusus lainnya.⁹⁵ Tentang keadilan pemimpin sebagaimana di kutip Hamka dalam sebuah hadis:

“Sesungguhnya manusia yang paling disukai Allah di hari kiamat dan paling dekat majelisnya dengan Allah, ialah imam yang adil dan sesungguhnya manusia yang paling dibenci oleh Allah dan paling

⁹¹*Ibid*, h. 3-5.

⁹²*Ibid*, h. 4.

⁹³Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 5.

⁹⁴ *Ibid*, h. 48.

⁹⁵Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta : UI Press, 1998, H. 150. Juga dalam Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 49

jauh kedudukannya dari sisi Allah di hari kiamat, ialah imam yang dzalim."⁹⁶

Menurut Hamka keadilan tidak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan ataupun pertentangan ideologi keadilan seorang pemimpin harus dapat dirasakan oleh semua rakyatnya. Sebab pemimpin yang adil merupakan sendi tegaknya sebuah Negara.⁹⁷

Rakyat yang taat, Kewajiban masyarakat adalah menaati aturan yang telah diatur dan disusun oleh pemimpin. Kebebasan seseorang tidak akan terjamin jika masyarakat tidak mengakuinya.

“Seorang muslim wajib mendengar dan wajib menaati Perintah pemimpinnya, baik dalam perkarayang ia sukai maupun yang berat dipikulnya, selama pemimpin itu tidak menyuruh maksiat, yaitu durhaka kepada Allah. Jika ia telah menyuruh durhaka kepada Allah, tidak mau mendengar dan tidak mau taat lagi.”

Musyawarah, musyawarah merupakan prinsip utama pemerintahan Islam. Bermusyawarah diakui dengan suara terbanyak.

“urusan-urusan pemerintahan, ekonomi, sosial, kebudayaan, kecerdasan pendidikan dan lain-lain sebagainya, dinamai *al-amr*. Pengangkatan kepala Negara, pemerintahan, bernama khalifah, atau amirul mu'minin atau sultan atau apapun namanya, termasuklah kepada *al- amr*. *Al-amr* yang melingkungi beribu-ibu persoalan sepanjang hidup, janganlah diputuskan sendiri, tetapi musyawarahlah!”

Sebagaimana pandangan Hamka tentang musyawarah. Hamka berpendapat bahwa seseorang yang memisahkan diri dari musyawarah adalah sebuah penghianat dalam sebuah Negara. Sebuah pemerintahan

⁹⁶Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 49.

⁹⁷ *Ibid*, h. 51

akan berjanji ke pemerintah dan masyarakat senantiasa bermusyawarah.⁹⁸ Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, beliau mengajak kaum muslimin untuk bermusyawarah mengenai persoalan-persoalan yang yang tidak ditemukan jawabannya di dalam wahyu.

Politik pemerintahan dalam Islam menurut Quthb di bangun atas tiga asas; keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara penguasa dengan rakyat. Menurutny ini merupakan garis-garis besar yang bersifat dasar.

Pemimpin yang adil haruslah mutlak, keadilannya tidak boleh memihak dan dipengaruhi oleh hubungan kerabat antar berbagai individu dan tidak pula oleh perasaan benci antar suku. Setiap individu harus menikmati keadilan yang sama,tidak melupakan diskriminasi yang dikarenakan masalah nasab dan kekayaan karena uang dan pangkat. Tetapi ini merupakan nilai keadilan yang belum pernah dicapai oleh hukum keadilan dunia.⁹⁹

Ketaatan rakyat, sebagaimana firman Allah, dalam surat al-Maidah ayat 49 “*Wahai orang-orangyang beriman taatilah Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu*”. Menurut Quthb pengabungan ketaatan kepada Allah, rasul dan orang-orang yang memegang kekuasaan yangada dalam ayat ini memiliki arti bagi watak dan batas-batas ketaatan itu.menaati pemimpin

⁹⁸Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 25

⁹⁹Sayyid Quthb, *KeadilanSosial dalam Islam*, h. 130.

merupakan perpanjangan dari taat terhadap syariat Allah dan Rasul-Nya. taat terhadap pemimpin dalam Islam bukan karena semata-mata memiliki penjabaran yang tinggi, akan tetapi sebuah usaha untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nyalah yang harus ditaati.¹⁰⁰ dengan demikian ketaatan rakyat terhadap pemimpin terbatas dan terikat oleh pelaksanaan syariat islam.

Mengenai musyawarah antara penguasa dan rakyat, Quthb berpendapat bahwa permusyawaratan merupakan salah satu prinsip prinsip pemerintahan dalam Islam., sedangkan teknisnya, secara khusus tidak ditetapkan. Dengan demikian bentuknya disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan.¹⁰¹ Pada masa Rasulullah Saw beliau mengajak kaum muslimin untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak diberikan jawabannya oleh wahyau dan mengambil pendapat orang yang lebih tahu tentang urusan duniawi.¹⁰²

penjelasan-penjelasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam bidang politik pemerintahan, antara Hamka dan Quthb memiliki corak yang sama yaitu bahwa Islam memberikan jaminan kepada setiap individu, dan mengenai siasat pemerintahan dalam Islam semuanya telah diatur dalam al-Quran dan sunnah serta musyawarah untuk mencapai pemerintahan yang adil dalam Islam dan sejahtera.

¹⁰⁰ Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 131.

¹⁰¹ *Ibid*, h. 133.

¹⁰² *Ibid*,.

Politik pemerintahan Islam membicarakan persoalan kepemimpinan kaum pria atas wanita, sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yaitu

*“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (kaum wanita). Dan karena mereka telah menafkahkan hartanya...”*¹⁰³

Kelebihan laki-laki atas wanita terletak pada keterampilan kesesuaian dan keistimewaan kaum pria dalam melaksanakan kepemimpinannya. Kaum pria dengan keterlepasannya dari tanggungjawab keibuan dapat menghadapi tugas-tugas masyarakat dengan kesempatan yang lebih besar. Mereka dilengkapi pula dengan akal yang kuat, sedangkan perempuan mengeluti tanggungjawab diatas sifat-sifat kelembutan biologisnya. Sedangkan laki-laki dibangun atas dasar kekuatan rasio.¹⁰⁴

Konsep keadilan menurut Hamka sesuai dengan konsep-konsep keadilan dalam Islam. Melihat penjelasan yang penulis uraikan diatas sebenarnya keadilan sosial dalam Islam bertumpu pada tauhid atau kekuasaan Allah. Penegakkan keadilan harus dimuali dari pembebasan jiwa-jiwa manusia. Menghilangkan rasa takut akan kehidupan. Suatu keadilan sosial akan bisa ditegakkan apabila keadilan itu berasal dari hal jiwa-jiwa. Jika jiwa sudah merdeka, maka akan menemukan jalan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat

¹⁰³ Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tajwid* (Bogor : Sigma, 2007), h. 84.

¹⁰⁴ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, h. 72.

B. Relevansi Pemikiran Hamka Tentang Keadilan sosial dalam Islam terhadap Problem sosial di Indonesia

Keadilan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menentukan arah dan tujuan suatu masyarakat. Indonesia adalah Negara yang berdasarkandengan pancasila. Salah satu tujuan terpenting dari terbentuknya suatu Negara yaitu megutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima pancasila yang merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia.

Melalui sila kedua yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradap" dan sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kata adil dalam sila kedua bermakna bahwa nilai kemanusiaan harus di junjung tinggi, sedangkan sila kelima bermakna bahwa itu sebuah usaha Negara untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat dimata sosial hukum bernegara. Semuanya sebuah usaha dan cita-cita luhur untuk menciptakan masyarakat yang simbang, selaras dan sejahtera.

Pada masa pra kemerdekaan paratokoh merancang dasar Negara untuk Indonesia. Prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam sila kelima pancasila yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yaitu "kemakmuran yang harus bisa dinikmati oleh segenap bangsa Indonesia, karena kepentingan inilah suatu bangsa terbentuk. Sila kelima pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia, seharusnya masyarakat

menyadari akan keadilan sosial tersebut. Keadilan haruslah ditegakkan dan disadari oleh masing-masing individu dan tidak memandang status sosial.

Problem sosial di Indonesia saat ini adalah tentang kemiskinan. Secara umum, kemiskinan disebabkan oleh dua hal, yaitu, pertama, kemiskinan alamiah dan kemiskinan terstruktur. Kemiskinan alamiah terjadi karena kelengkapan sumberdaya alam, kondisi tanah yang tandus, tidak adanya lahan pertanian, tidak adanya pengairan, dan kelengkapan prasarana lainnya diluar kemampuan manusia. Kemiskinan secara alamiah ini tidak terjadi di Indonesia. Sedangkan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang diakibatkan oleh kelembagaan atau struktur yang tidak mampu mengelola dan menyediakan akses yang merata kepada setiap anggota masyarakat.¹⁰⁵

Penyebab terjadinya kemiskinan dalam kategori kemiskinan structural berawal dari akumulasi ketidakadilan sosial. Problem ketidakadilan di Indonesia meranah sampai kepada bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan hingga dalam penegakkan hukum. Banyak kasus besar yang dibiarkan begitu saja oleh para hakim. Sementara kasus kecil diadili secara berlebihan.

Padahal dalam sila kelima pancasila menjamin kesejahteraan serta berhak untuk memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama. Serta menuntut penyelenggara Negara berlaku adil, dan setiap hakim berlaku adil kepada seluruh rakyat Indoensia, tanpa melihat latar belakang. Sila

¹⁰⁵ Mohtar Mas'ood, *Politik Birokrasi dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 138.

kelima pancasila dan sila-sila lainnya jika diterapkan secara maksimal akan menjadi bangsa Indonesia maju dan mampu bersaing ditengah peradaban dunia. Namun pada kenyataannya banyak pihak elit yang mengkhianati dan melanggar nilai-nilai luhur pancasila.

Untuk itu, dalam pemikiran keadilan sosial, Hamka menawarkan sebuah konsep islam, yang apabila diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketidakadilan di Indonesia terutama dalam bidang ekonomi, yaitu kesenjangan sosial. Dalam kitab suci al-Qur'an ajarannya sangat memihak pada penegakkan keadilan sosial, misalnya terdapat dalam QS.An-Nahl ayat 90

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan menyuruh kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*¹⁰⁶

Dengan ditegakkannya prinsip-prinsip keadilan sosial dalam islam tersebut, diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi setiap orang agar bisa mengamalkan ajaran agama Islam dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

¹⁰⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemah*, h. 277.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan sosial dalam Islam menurut Hamka dapat dibagi menjadi tiga konsep yaitu, keadilan dalam bidang ekonomi, keadilan dalam bidang hukum dan keadilan dalam politik pemerintahan. Dari ketiga konsep tersebut memiliki tiga pokok prinsip keadilan sosial yang dapat digunakan untuk mewujudkan keadilan, yaitu: kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan, dan jaminan sosial. Kebebasan jiwa adalah pembebasan bagi setiap jiwa-jiwa individu bebas dari pengkekangan dan perbudakan. Kebebasan jiwa harus berpedoman kepada kitab suci al-Qur'an agar manusia terbebas dari rasa takut dan segala bentuk pengkekangan. Persamaan kemanusiaan, persamaan adalah hak setiap manusia, karena dari awal penciptaan manusia adalah sama maka setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup dan hak yang sama dihadapan hukum. Jaminan sosial, setiap hidup masyarakat di dalam sebuah Negara memiliki jaminan-jaminan, sehingga masyarakat tidak perlu takut. karena kebebasan yang diberikan tidak secara mutlak, karena setiap kebebasan individu di batasi oleh kebebasan individu lain. Setiap individu memiliki hak, akan tetapi juga harus melaksanakan kewajibannya.

Tentang relevansi pemikiran Hamka dengan problem sosial di Indonesia teori keadilan sosial Hamka sangat relevan dan tidak bertentangan dengan dasar ideology Negara karena teori keadilan sosial Hamka relevan dengan sila ke-2 dan ke-5 Pancasila. Meskipun relevan tetapi teori keadilan sosial Hamka tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia terdiri dari berbagai suku ras dan agama.

B. Saran

Skripsi yang berjudul “ **Studi Kritis Atas Pemikiran Hamka tentang Keadilan Sosial dalam Islam**” ini masih sangat sederhana dan tidak lepas dari berbagai kekurangan, semoga ada tulisan-tulisan lain setelah ini yang memberikan informasi mengenai tema ini lebih baik lagi. Apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini adalah sebuah bentuk usaha ilmiah penulis dalam memberikan deskripsi sederhana tentang tema yang diangkat.

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan pengetahuan bagi para pembacanya. Dan alangkah baiknya jika konsep keadilan sosial dalam Islam yang ditawarkan oleh Hamka ini dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Terutama bagi individu membebaskan diri dari bentuk-bentuk ketidakadilan dan pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk menghidupkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Demikian skripsi ini penulis sajikan, semoga memberikan tambahan pengetahuan untuk mewujudkan keadilan di muka bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Hakim, Atang. *Filsafat umum dari Metodologi Sampai Teofilosofi*, Pustaka

Setia, 2008

Ali, M. Daud, dkk. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta:

Departemen Agama RI, 1986

Bakker, Anton, dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafa*,

Yogyakarta : Kanisius, 1990

Firdausan. *Risalah Tauhid*, Jakarta: Bulan Bintang 1975

Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia 2007

Hamka. *Keadilan sosial dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2015

Pandangan Hidup Muslim, Depok : Gema Insani, 2016

Tasawuf Modern, Jakarta : Reuplika, 2015

Hamka, Rusdy. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta: Mizan Publika, 2016

Hatta, Mohammad. *Akam Pikiran Yunani*, (Jakarta: UI Press, 1986

Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2008

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tajwid*, Bogor: Sigma, 2007

Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta:

Paradigma, 2010

Lebacqz, Karen. *Six Theories of Justice*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Teori

Teori Keadilan, Bandung: Nusa Media, 2015

Magnis Suseno, Frans. dkk, *Etika Sosial*, Jakarta : Gramedia, 1993

Maksum, Ali. *Pengantar Filsafat (Dari Klasik hingga Modern*, Jogjakarta :

ArRuzz Media, 2011

Mas'ood, Mohtar. *Politik Birokrasi dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2013

Mohammad, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 1984

Mohammad, Herry, dkk, *Tokoh - Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*,

Jakarta Gema Insani, 2006

Nurlaili, Siti, Waryunah dkk. *Buku Panduan Skripsi*, Sukoharjo: FUD Press, 2016

Rif, Bahrudin dan Hasan Mud. *Filsafat Tasawuf*, Bandung : Pustaka Setia, 2010

Rithi, Hyrominus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik hingga*

Postmodernisme), cet. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2017

Sadjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta : UI Press, 1998

Tim Penyusunan, *Ensiklopedi Islam*, j.2. c, 9, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001

Quthb, Sayyid, *al-Adalah al-Ijtima'iyah fil-Islam*, diterjemahkan oleh Afif

Mohammad. *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1984

Jurnal

Bahder Jihan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari

Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”. Dalam *Yustisia*, 2014.

Bakri, S. (2019). Dakwah Sufisme Jawa dan Potret Keberagamaan di Era Milenial berbasis Kearifan Lokal. *Esoterik: Jurnal Ahlak dan Tasawuf*, 5(02), 267-281.

Bakri, S. (2020). *Akhlaq Tasawuf: Dimensi Spiritual dalam Kesejarahan Islam*. Sukoharjo: EFUDEPRESS.

Bakri, S. (2019). Reviewing the Emergence of Radicalism in Globalization: Social Education Perspectives. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 06, 09.

Bakri, S. (2019). Pemikiran Filsafat Manusia Ibn Miskawaih: Telaah Kitab Tahdibz al-Akhlak. *Jurnal Al-A'raf*. XV, 01.

Bakri, S., & Akar, D. (2017). *Menelusuri Jejak Enam Kiai di Soloraya*. Surakarta: Bukuku Media.

Bakri, S. (2020). Teaching Values of Islamic Communism in Surakarta: Issues in the First Quarter of the 20th Century. *Journal of Social Studies Education Research*, 11, 01, 192-212.

Bakri, S. (2020). *Islam Melayu: Mozaik Kebudayaan Islam di Singapura dan Brunei*. Surakarta: PT. Aksara Solopos.

Fauzi Al-Mubaraq, “Keadilan Dalam Perspektif Islam”, dalam *Istighna*, Vol I, no 2, 2018.

Pan Muhammad Faiz,” Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Konstitusi*, Vol. 6, no 1, h. 140.

Roro Fatikhin, “Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Quran dan Pancasila”, dalam

Panangkaran, Vol 1, no 2, 2017.

Bakri, Syamsul. “Agama, Persoalan Sosial dan Krisis Moral”, dalam *Komunika*, Vol.3, No. 1, 2009.

Usep Taufik Hidayat, Tafsir Al- Azhar : Menyelami Kedalaman Tasawuf Hamka”, dalam *Al Turas*, Vol. XXI, No. 1 ,2015.

Wahyudi, M. A. (2018) Psikologi Sufi: Tasawuf Sebagai Terapi. *Esoterik: Jurnal Ahlak dan Tasawuf*, 04, 02.

Wahyudi, M. A. (2020). Berdamai Dengan Emosi Saat Karantini Diri. KPIN (Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara).

Wahyudi, M. A. (2016). Ajaran Zuhud Dalam Pemikiran R.M.P. Sosrokartono. Surakarta: IAIN Surakarta.

Yunie Herawati, “Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, no. 1, 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

1. Nama Lengkap : Heni Handayani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 02 Maret 1998
3. Alamat : Pondok, Rt.20, Trombol, Mondokan,
Sragen
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Telepon 089672297133
8. E-mail : henihan55@gmail.com
9. Nama orang tua
 - Ayah : Sumardi
 - Ibu : Warsiti
 - Pekerjaan ayah : Swasta
 - Pekerjaan ibu : Ibu RumahTangga
10. Alamat orang tua : Pondok, Rt.20, Trombol, Mondokan,
Sragen
11. Riwayat pendidikan
 - MI Muhammadiyah Trombol
 - SMP Islam Terpadu Muhammadiyah Miri
 - SMK Muhammadiyah 8 Tanon
 - IAIN Surakarta

RIWAYAT ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam 2018

Surakarta, 23 Februari 2021

Heni Handayani

161121030

